



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA CILEGON
UNIT KERJA : DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NUR FATMAH**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **105919**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 14.148.300.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA CILEGON , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah Seluas 878 m2 di KAB / KOTA KOTA CILEGON , HASIL SENDIRI Rp. 1.756.000.000
3. Tanah Seluas 8041 m2 di KAB / KOTA KOTA CILEGON , WARISAN Rp. 8.041.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 620 m2/359 m2 di KAB / KOTA KOTA CILEGON , HIBAH TANPA AKTA Rp. 3.000.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 323 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA CILEGON , HASIL SENDIRI Rp. 1.001.300.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. ----

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 105.500.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 8.441.365

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 14.262.241.365

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 14.262.241.365

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.